



## **Bagian Satu:**

# **Prospek dan Tragedi Perekonomian Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## Prospek Ekonomi Riau Memasuki Alaf Baru

**MEMPROYEKSIKAN** perkembangan perekonomian Riau memasuki alaf baru (millenium ketiga) dihadapkan pada beberapa kendala yang substantif terkait dengan data. Pada masa ini, tidak dapat dijamin sejauh mana akurasi data dan validitasnya, mengingat berbagai gejolak pada masa sebelum dan saat krisis. Akibatnya komitmen terhadap data diperkirakan merosot pula.

Mengamati kondisi yang ada, paling tidak, saat ini yang dapat dilakukan hanyalah membuat prediksi jangka pendek yang mengacu pada gejala-gejala dinamika ekonomi jangka pendek pula. Bagaimanapun, data statistik yang dikeluarkan BPS merupakan acuan yang paling mungkin digunakan. Oleh karena itu, prediksi ekonomi ini didasarkan pada asumsi-asumsi yang digunakannya.

Guncangan ekonomi Indonesia akibat merosotnya nilai tukar rupiah memberi warna suram bagi tumbuhnya perekonomian Riau. Dua dari sektor unggulan perecono-



mian Riau terbabat habis. Sektor industri yang kontribusinya mencapai 30,75 persen sebelum krisis, tumbuhnya sebesar 13,73 persen. Pada saat pra krisis, pertumbuhannya merosot menjadi hanya 8,64 persen. Sedangkan pada saat pasca krisis, turun secara tajam menjadi minus 4,21 persen.

Kecadaan ini terjadi karena industri di Riau pada umumnya padat modal dan banyak menggunakan produk impor. Peran industri kecil dalam menembus pasar asing masih relatif kecil mengingat orientasi pasar mereka lebih banyak ke pasar dalam negeri. Sedangkan industri besar beroperasi dengan biaya ekonomi yang cukup tinggi, sehingga koreksi terhadap pendapatan bersinerji dengan membengkaknya biaya produksi menyebabkan sektor industri sulit untuk bangkit dalam jangka pendek.

Memasuki alaf baru nanti, perkembangan sektor industri masih sangat tergantung pada membaiknya kondisi makro ekonomi Indonesia. Tingkat bunga pinjaman yang masih tinggi dan kisaran nilai tukar yang belum stabil, menyebabkan investor sulit menggerakkan ekonomi di sektor industri. Pilihan yang paling mungkin adalah mengembangkan industri hilir sektor pertanian, meskipun dalam skala ekonomi yang relatif kecil.

Dalam hubungan ini, pemerintah harus memilih komoditas-komoditas yang memiliki nilai komparatif dan memadukan pembinaan ke arah mutu (kualitas), agar produk daerah dapat dipasarkan secara global untuk menunjang terbukanya lapangan usaha dan kesempatan kerja baru.

Sektor perdagangan, meskipun masih terkoreksi cukup tajam sehingga pada masa pasca krisis hanya mampu tumbuh sebesar 0,40 persen, memasuki awal alaf baru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan pengutipan Universitas Riau.





mendatang diperkirakan akan menunjukkan gejala yang membaik. Sistem tata niaga yang sebelum ini amburadul oleh badai krisis ekonomi, diperkirakan mulai akan menemukan kembali formatnya. Namun demikian, pertumbuhannya akan tetap lambat karena banyak faktor eksternal yang mempengaruhinya.

Memperbaiki sektor perdagangan ini akan memberi peluang bagi Bergeraknya sektor lain, seperti jasa dan angkutan. Hanya saja kenaikan tarif angkutan yang direncanakan diberlakukan pada tahun 2000 mendatang dapat memukul kembali sektor perdagangan karena membengkaknya harga jual. Sementara itu, daya beli masyarakat belum menunjukkan perbaikan yang berarti.

Kemudian, sektor pertanian yang selama krisis ekonomi justru menunjukkan *booming*. Ini, justru akan menunjukkan gejala pertumbuhan yang melambat. Selama ini, pertanian di Riau sangat monokultur dan sangat banyak dikuasai para "pemburu rente" yang berinvestasi dengan mengandalkan kekuasaan birokrasi.

Dewasa ini berbagai kasus di sektor perkebunan justru muncul, yang diperkirakan akan membawa dampak pada kinerja sektor ini. Berbagai kelompok masyarakat yang selama ini merasa hak dan marwahnya dirampas oleh berbagai perusahaan perkebunan melakukan perlawanan secara terorganisir. Perlawanan rakyat petani ini jelas akan memberikan sumbangan yang negatif pada sektor pertanian di masa yang akan datang.

Mengingat banyaknya masyarakat yang hidup di sektor pertanian, pemerintah hendaknya lebih progresif untuk mengembangkan pertanian rakyat berdasarkan konsep



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan penyalinan atau penyebaran ulang tanpa izin Universitas Riau.
2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

pervilayahan. Ini penting, untuk melahirkan diversifikasi hasil produksi pertanian yang memiliki nilai jual internasional. Keterkaitan fungsional antar struktur industri dan pertanian harus diarahkan pada komoditas yang erat dengan kehidupan masyarakat dan mempunyai peluang pasar yang baik.

Sektor keuangan dan perbankan di awal alaf baru mendatangkan masih akan menunjukkan wajah yang suram. Secara nasional, belum tuntasnya berbagai kasus perbankan menyebabkan sektor ini sulit menemukan jati dirinya kembali. Sementara isu-isu Y2K sedikit banyak menyebabkan arus dana perbankan akan mengalami defisit. Prinsip kehati-hatian masih akan tercermin dari dunia perbankan Indonesia yang dengan sendirinya akan menyulitkan bergesernya sektor riil. Fungsi institusi perbankan sebagai *intermediary business* belum akan berjalan normal.

Pada sisi lain, isu kenaikan tarif listrik untuk mengurangi subsidi telah menimbulkan reaksi yang kurang positif bagi pelaku ekonomi. Mereka mulai melakukan ancap-ancap untuk mengamankan bisnisnya dengan menaikkan harga atau melakukan efisiensi yang tidak searah dengan kebutuhan perbaikan ekonomi secara makro. Masyarakat yang daya belinya sudah sangat rendah, menanggapi dengan skeptis dan bahkan dapat memicu kerawanan sosial yang justru sangat kontradiktif dengan perbaikan upaya ekonomi secara keseluruhan.

Secara umum, perekonomian Riau pada awal alaf baru dapat saja mengalami perbaikan. Hanya saja, untuk itu diperlukan beberapa persyaratan yang justru berada di luar tatanan perekonomian itu sendiri. *Pertama*, sangat dibutuhkan





suatu konsensus antar struktur masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah. Pernik-pernik kerawanan sosial sudah mulai mengemuka, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kondisi ini tentunya sangat merugikan upaya perbaikan ekonomi Riau ke depan.

Tidak satu kelompok masyarakatpun yang akan diuntungkan, jika kerusakan sosial terjadi di Riau mengingat tidak adanya satu kelompok masyarakatpun yang memiliki kekuatan yang dominan. Tanpa adanya konsensus yang positif bagi perkembangan Riau secara bersama tidak akan diperoleh format perbaikan ekonomi yang jelas.

Kedua, kesuksesan melalui pemilu lokal akan sangat besar artinya bagi tercapainya stabilitas kehidupan masyarakat di Provinsi Riau. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu lokal sedikit banyak akan memberi warna tersendiri bagi perkembangan perekonomian di wilayah ini, khususnya para investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah kabupaten yang baru.

Ketiga, kepastian tentang otonomisasi, baik pelaksanaan format yang sudah ada sekarang, maupun reformasi ke arah sistem yang lebih menjamin pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Semakin otonom suatu daerah maka semakin mungkin diupayakan perbaikan ekonomi wilayah itu. Ini berarti perekonomian Riau akan sangat dipengaruhi oleh konsistensi dan konsekuensi pemerintah pusat tentang otonomisasi.

Terakhir, melihat perkembangan kawasan Asia yang relatif membaik, maka diharapkan memberi pengaruh pada membaiknya perekonomian Riau. Ini dapat terjadi, bila masyarakat Riau dapat diajak secara positif untuk



menangkap peluang-peluang tersebut. Bila tidak, justru yang akan muncul adalah proses kemiskinan tahap kedua yang konsekuensi logisnya, tentu lebih parah dari apa yang selama ini dialami masyarakat Riau.

Bagaimana cara terbaik melakukan ini adalah dengan melakukan konsolidasi proses pelaksanaan pembangunan melalui reformasi dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasannya.\*\*\*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



## Fenomena Politik dan Prospek Ekonomi Riau 2001 (1)

**TIDAK** gampang mereka-reka apa yang akan terjadi di Riau pada tahun pertama alaf baru. Variabilitas faktor yang mempengaruhinya sangat heterogen dengan guncangan yang sangat cepat. Pendekatan yang paling mungkin dilakukan adalah menelaah beberapa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, baik politik maupun ekonomi, pada tingkat global, nasional, dan pada skala lokal.

Banyak ruang-ruang yang mencerminkan wajah pesimis, mengingat berbagai peristiwa yang terjadi sebelum ini menunjukkan makin parahnyanya penyakit bangsa sehingga sulit disembuhkan. Namun, ruang yang tersisa untuk berbenah diri tetap saja ada. Asal dimanfaatkan secara optimal, wajah ceria bukan tidak mungkin akan memantul secara apik.

### Fenomena Global

Bakal ada perbaikan dalam perekonomian secara global sejalan dengan membaiknya perekonomian negara-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





negara industri, khususnya Amerika Serikat. Meskipun berbagai bursa saham yang menjadi barometer ekonomi dunia, khususnya *New York Stock Exchange*, mengalami *bearis*, namun dengan penurunan suku bunga FED sampai dua kali telah mampu menggairahkan bursa saham tersebut.

Globalisasi sebagai suatu sistem yang internasional yang baru memberikan peluang untuk menstimulus gerakan perekonomian. Banyak orang dapat mereguk kenikmatan pasar bebas, perlindungan hak azazi manusia, dan konsep kemakmuran bersama. Meningkatnya interdefedansi ekonomi memberi ruang gerak terselenggaranya proses demokrasi, dan keinginan untuk hidup damai yang saling menguntungkan. Hanya saja, hubungan antar negara masih saja akan diselimuti oleh fenomena klasik yang bertumpu pada keterkaitan antar potensi kekuatan, walaupun bentuknya berubah dari bersifat tradisional kepada adu kekuatan modernisasi.

Indonesia tentunya harus berjuang keras meningkatkan rasa percaya antar sesama bangsa di dunia. *Solo karir* Gus Dur ke manca negara belum memberikan arti positif bagi tumbuhnya kepercayaan asing. Dalam skala regional malah terjadi gesekan-gesekan, seperti timbulnya kesalahpahaman dengan pemerintah Singapura yang dapat mengganggu kolaborasi ekonomi antara kedua negara.

Bagi Riau, fenomena ini merupakan variabel pengganggu yang cukup signifikan. Singapura merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Asia dan pintu gerbang lalu lintas modal mancanegara. Melalui otonomi daerah sebenarnya Riau memiliki kesempatan untuk menjalin hubungna bilateral yang lebih baik dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Singapura. Akibat gesekan-gesekan tadi kesempatan itu dapat tenggelam dengan sia-sia.

Fenomena ASEAN sendiri akhir-akhir ini memunculkan persoalan kredibilitas dan relevansi hubungan kerjasamanya yang dipicu oleh krisis ekonomi, problema domestik negara-negara anggota, aspek tradisi ASEAN. Termasuk sulitnya mengembangkan ASEAN secara institusional. Skandal presiden Filipina dan amburadulnya manajemen pemerintahan Indonesia semakin mempersulit ditemukannya resep yang manjur bagi pemulihan kerjasama ASEAN. Masing-masing negara lebih disibukkan oleh masalah dalam negeri yang kian pelik, sehingga upaya menjalin kerjasama luar negeri kurang memiliki daya dukung positif.

### Fenomena Nasional

Kesulitan mempertajam prioritas pemulihan ekonomi di Indonesia tidak saja bersumber dari aspek ekonomi tetapi telah merambah menjadi persoalan multi krisis. Meskipun beberapa indikator ekonomi menunjukkan gejala yang membaik, ke depan tidak diharapkan terjadi hal yang serupa. Kurs rupiah yang terperosok menimbulkan rasa cemas bagi pemulihan ekonomi Indonesia.

Bagi rakyat yang bergerak di sektor pertanian merosotnya nilai rupiah justru memberikan berkah dengan naiknya harga komoditas mereka. Bila tidak terdistorsi oleh performa pasar yang cenderung berperilaku monopsoni nilai tambah yang dapat diterima petani Riau akan lebih besar lagi. Ke depan, mengatasi bentuk pasar *kolusi-oligopsonis* ini menjadi pasar persaingan yang sehat dalam komoditas pertanian seharusnya diprioritaskan instansi terkait. Bila





tetap saja hanya ada dua perusahaan eksportir CPO akan senan tiasa sulit mengangkat kesejahteraan para petani.

Pada satu sisi, kepercayaan masyarakat tidak mungkin ditumbuhkan bila nilai tukar rupiah tetap mengalami kemerosotan, khususnya bagi mereka yang bergerak di sektor industri. Walaupun ada geliat naiknya daya beli masyarakat petani, tetapi tidak dapat diandal kan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Bertopang pada daya dorong konsumsi untuk menggairahkan eko nomi lebih riskan tanpa didukung kemampuan berinvestasi.

Kemampuan Indonesia untuk mengantisipasi para spekulan sangat mandul, baik secara politik maupun secara ekonomi. Berbagai kebijakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah masih terkesan amburadul dan kurang menyen- tui persoalan dasar yang dihadapi bangsa. Koordinasi antara para pengambil kebijakan nampaknya belum solid sehingga sasaran yang ingin dicapainya terkesan kurang memenuhi target.

Pada skala mikro banyak institusi bisnis yang mengalami kelimpahan sehingga roda perekonomian sektor riil sulit ditngkatkan percepatannya. Justru dalam permainannya menunjukkan gejala-gejala yang kurang sehat sejalan dengan lemahnya sistem hukum negara. Berbagai institusi ekonomi yang bersifat strategis menunjukkan masalah-masalah yang tidak kunjung berakhir. Gonjang-ganjing yang terjadi di BI, tersendatnya restrukturisasi BUMN, dan belum tersele- saikannya kasus KKN pada beberapa institusi bisnis yang dikelola negara menghadang upaya-upaya dalam mengem- balikan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Wajah muram perbaikan ekonomi *dicubiti* pula oleh fenomena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





politik yang cenderung mengedepankan budaya partisan dan kelompok. Persoalan-persoalan bangsa yang seharusnya lebih diutamakan menjadi terpinggirkan oleh perilaku-perilaku politik yang mengedepankan pembenaran kepentingan kelompok dan menonjolkan supremasi massa. Keinginan menegakkan supremasi hukum sebagai prasyarat mutlak demokratisasi dan perilaku ekonomi yang adil tidak ditampilkan.

Berlarut-larutnya persoalan pemilihan ketua MA. semakin memperuncing hubungan legislatif dan eksekutif, kasus Tommy Suharto, skandal Buloggate, dan Bruneigate, persoalan Aceh dan Irian, kasus peledakan bom di beberapa wilayah Indonesia, dan beberapa kasus lainnya yang akhirnya yang sampai akhir tahun 2000 belum dapat dituntaskan, akan menjadi faktor penghambat bagi terselenggaranya mekanisme ekonomi yang mulus.

Persoalan politik dan hukum menjadi semakin rumit ditenggarai dengan berbagai produk hukum yang lahir pada zaman Orba karena substansinya memang tidak mengedepankan kepentingan bangsa. Orientasinya lebih mengedepankan kepentingan Suharto dan rezimnya. Anehnya, produk hukum yang ditelurkan pada akhir-akhir ini belum juga mencerminkan kedewasaan berbangsa dan bernegara. Kepentingan politik partisan dan kelompok masih sarat mewarnainya. Kesadaran untuk mengedepankan kepentingan rakyat masih tipis, sehingga cukup sulit memformulasikan produk-produk hukum dan kebijakan yang “renyah” atau sehat bagi masyarakat.\*\*\*



## Fenomena Politik dan Prospek Ekonomi Riau 2001 (2)

**FENOMENA** politik nasional yang akan sangat mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat di daerah, khususnya Riau adalah keseriusan pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah. Masih banyak aturan pelaksanaan dari UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 yang harus dibuat agar otonomi dapat berjalan mulus. Sayangnya, tarik-menarik antara pemerintah pusat dengan kepentingan daerah dan ego departemen sektoral menjadi kendala memuluskan implementasinya. Kekhawatiran pusat terhadap daerah dijadikan kambing hitam untuk mencautkan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri dalam arti yang sesungguhnya.

Melemahkan legitimasi terhadap pemerintahan Gus Dur akibat adanya kebijakan dan perilaku politiknya menambah sulit penerapan otonomi secara baik. Tanpa perubahan gaya kepemimpinan Gus Dur persoalan-persoalan bangsa ke depan akan tetap terselimuti kekisruhan.



## Fenomena Lokal

Fenomena politik di Riau juga belum searah dengan keinginan memberdayakan rakyat. Pada beberapa kabupaten dan kota yang baru dimekarkan nuansa wacana yang mengemuka adalah permasalahan anggota dewan dan pemilihan bupati definitif. Belum lahir upaya antisipasi ekonomi daerah yang sehat untuk kepentingan bersama. Kondisi ini memberikan peluang munculnya tindak korupsi dan penyelewengan aparat birokrasi karena kontrol masyarakat yang lemah melalui DPRD.

Pada level provinsi amat disayangkan beberapa perilaku politik yang ditampilkan DPRD sangat melukai hati rakyat, seperti kasus pengkaplingan anggaran untuk kepentingan pendapatan anggota DPRD yang demikian fantastis, usaha pembangunan kantor yang mematok anggaran mencapai Rp. 65 miliar (diduga pula ada *mark up* dalam masalah ini). Termasuk penyediaan fasilitas transportasi mobil dinas yang jumlahnya cukup mencengangkan. Bahkan pada akhir-akhir ini merebak lagi kasus koperasi *tameng* yang digunakan untuk mengkapling lahan sawit.

Dikhawatirkan perilaku-perilaku seperti ini akan merembes pada DPRD di tingkat kabupaten/kota. Gejalanya sudah mulai kelihatan dan upaya pencegahannya sangat sulit karena kontrol dari masyarakat belum dapat ditumbuhkan secara konstruktif. Supremasi massa akhirnya menjadi perjuangan rakyat dan hasilnya tidak produktif bagi tegaknya demokrasi yang sehat.

Pada akhirnya perjuangan masyarakat Riau menjadi kurang solid dan terpolarisasi satu sama lain. Keadaan ini dapat dibuktikan dengan gagalnya perjuangan CPP Block,





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penambangan pasir laut, hutan kemasyarakatan, UU Migas, bagi hasil SDA yang lebih adil, dan banyak lagi kesewenang-wenangan pemerintah pusat yang seharusnya dieliminir meskipun tidak harus meneriakkan “Riau Merdeka”.

Fenomena politik lain yang cukup pelik dihadapi adalah berlakunya perseteruan politik di Kepri. Diharapkan dengan pelantikan Huzrin Hood sebagai bupati Kepri upaya penyelesaian politik di wilayah itu dapat ditangani dengan baik. Mempersatukan kembali perjuangan rakyat Kepri dengan seluruh rakyat Riau lainnya tentunya akan lebih solid ketimbang terpecah belah. Jiwa besar Huzrin Hood setelah untuk lebih mendedepankan kepentingan Riau secara keseluruhan akan merupakan ujian awal keberhasilannya ke depan.

Elit politik di Kepri maupun dalam level provinsi harus lebih mendedepankan upaya mengatasi rusaknya terumbu karang oleh lubang-lubang penambangan pasir, tercemarnya lahan budidaya rumput laut, berkurangnya hasil tangkapan nelayan, rendahnya kualitas SDM, kurangnya infrastruktur pelayanan masyarakat. termasuk masalah-masalah klasik lain yang sulit diungkit dan selama ini membelenggu masyarakat. Transformasi struktural tanpa adanya tranformasi budaya akan menjadi sia-sia. Inilah yang mestinya didahulukan ketimbang terjebak oleh perseteruan kelompok yang tidak produktif.

### **Prospek Ekonomi Riau**

Dalam kegalauan politik seperti di atas; masih adakah celah bagi Riau untuk maju dan berkembang dari aspek ekonomi di tahun ini? Jawaban pertanyaan ini akan sangat



tergantung dari dari kepiawaian Riau memanfaatkan momentum desentralisasi fiskal. Pada tahun 2001 sejalan dengan diimplementasikannya otonomi daerah Riau dapat dikatakan ketiban rezeki anggaran.

Beberapa sektor yang akan mengalami perkembangan pesat seharusnya adalah sektor bangunan, perdagangan, dan telekomunikasi. Pemerintah harus menitikberatkan pembangunannya pada perbaikan infrastruktur. Kebijakan ini akan membuka peluang bisnis konstruksi yang amat pesat. Dua sisi dengan sendirinya akan terangkat, yakni infrastruktur daerah dan pengusaha lokal. Perbaikan sektor telekomunikasi dan listrik. Perkembangan sektor transportasi, listrik, dan telekomunikasi akan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan. Dipicu oleh adanya pengalihan para pegawai ke wilayah kabupaten Sinergi pendorong perkembangan perdagangan menjadi bertambah. Selanjutnya sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan di daerah akan terpacu pula untuk tumbuh.

Dengan berkembangnya sektor transportasi dan infrastruktur memberi peluang semakin lancarnya lalu lintas barang. Komoditas unggulan masyarakat dapat dikembangkan sebagai andalan ekspor. Bila pemerintah daerah konsisten untuk mengalokasikan 20 % dari APBD untuk pengembangan ekonomi rakyat, maka kemampuan daerah untuk tumbuh dan berkembang atas dasar kepentingan masyarakat akan semakin mulus. Bidang lain yang bakal marak adalah perbankan bidang pendidikan. Keinginan untuk meningkatkan SDM Riau merupakan pemacu utama berkembangnya dunia pendidikan di Riau.



Investasi pemerintah dalam bidang ini dapat memacu investasi swasta ke arah itu.

Bila indikator-indikator di atas dapat berjalan secara optimal diperkirakan perekonomian Riau pada tahun 2001 dapat tumbuh mencapai 7-8 persen. Sebenarnya pertumbuhan dapat lebih tinggi, tetapi mengingat bakal adanya distorsi di tingkat lokal dan dorongan pertumbuhan lebih didominasi oleh faktor konsumsi dan pengeluaran pemerintah. Kekhawatiran yang perlu diwaspadai adalah larinya uang dari Riau akibat pemerintah dan masyarakat tidak mampu memanfaatkan momentum desentralisasi fiskal secara optimal dan konstruktif. Apalagi bila DPRD tidak mampu menjalankan fungsi kontrol masyarakat secara efisien dan efektif. *Jangan sampailah.\*\*\**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## APBN 2000: Implikasi “Pelecehan” Riau

**DAMPAK** naiknya harga minyak dari 18 dolar AS sebagaimana diasumsikan dalam APBN 2000 menjadi 20 dolar AS per barrel memberikan tambahan penerimaan negara sebesar Rp. 2,4 triliun. Jumlah itu tentunya akan lebih besar, jika harga minyak dapat lebih tinggi. Di pasar internasional, justru harga tersebut sudah mendekati angka 30 dolar AS per barrelnya. Pemerintah dengan sendirinya harus melakukan revisi APBN 2000 dengan mengubah berbagai asumsi yang dipakai sebelumnya.

Para ahli menilai, revisi dilakukan pemerintah jangan sampai terperangkap pada penggunaan yang tidak produktif. Tambahan dana ekstra itu, sebaiknya digunakan pada sektor yang mampu memberikan efek stimulasi ekonomi, bukan untuk subsidi. Bentuknya dapat berupa proyek padat karya pembangunan infrastruktur yang saat ini sangat memprihatinkan terutama di berbagai daerah di luar Jawa.



Alokasi dana untuk subsidi BBM ini hanya akan menguntungkan Jawa. Sebab, pemakai BBM terbesar ada di Pulau Jawa. Jumlah mobil di Jakarta saja mungkin sudah mencapai 65 % dari seluruh jumlah mobil yang ada di Indonesia. Jadi, dengan pemanfaatan dana untuk subsidi sebenarnya daerah telah memberikan subsidi pada pusat. Pengorbanan itu, tentunya kurang signifikan, jika didekati dengan semangat otonomisasi yang sedang berdentung selama ini.

Memperhatikan rancangan APBN 2000 yang disusun pemerintah pusat sebenarnya terdapat "pelecehan" terhadap daerah secara konkret dan terlembaga. Riau sebagai penghasil minyak terbesar, hanya bagian jatah sebesar Rp. 821 miliar. Bagi pejabat yang *rada memble* di Riau jumlah itu dianggap fantastis. Namun, bila diamati apa yang seharusnya diterima oleh Riau, jumlah tersebut sangat menyakitkan hati nurani rakyat. Meningkatnya jumlah anggaran pembangunan untuk Riau memang perlu disyukuri. Namun, apabila peningkatan itu tidak pada proporsi yang seharusnya, tentunya Pemda dan masyarakat Riau harus dengan gigih mempertanyakan pada pemerintah pusat.

Alokasi dana pembangunan kabupaten/kota (DPKK) tahun anggaran 2000 terdiri atas dua kelompok, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum terdiri atas empat komponen. *Pertama*, dana perkapita sebesar Rp. 8.850 per kapita dengan dana minimum sebesar Rp. 2,0 miliar per kabupaten/kota. *Kedua*, dana menurut luas wilayah sebesar Rp 45.000 per KM<sup>2</sup>. *Ketiga*, dana untuk kabupaten/kota kepulauan bernama dan



berpendhuni. *Keempat*, dana tambahan tingkat pendapatan dan potensi daerah.

Berdasarkan pendekatan perhitungan tadilah, maka dianggarkan oleh Bappenas dan Depkeu untuk Riau pada tahun 2000 mendatang sebagian jatah sebesar Rp. 821 miliar. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi alokasi dana umum Kabupaten/kota sebesar Rp. 548.122.480 juta atau sebesar 66,75 %, sedangkan sisanya sebesar Rp. 272.877,952 juta, tinggal di provinsi/Dati I.

Persolannya sekarang adalah layak tidaknya Riau memperoleh anggaran sebesar itu, khususnya untuk dana alokasi umum ke kabupaten/kota? Dalam hubungan ini, contohnya dan yang diancarkan untuk Kepulauan Riau, Karimun, dan Natuna. Dalam pendekatan penghitungan yang digunakan Bappenas selain pendekatan penduduk dan luas wilayah, juga diadakan pendekatan jumlah pulau. Entah diperhitungkan atau tidak jumlah pulau yang ada di ketiga kabupaten tersebut, yang jelas dana alokasi umum yang diterimanya sangatlah minim.

Kabupaten Kepulauan Riau dalam rancangan APBN 2000, hanya mendapt dana alokasi umum sebesar Rp. 3.180.904 juta. Berarti hanya sebesar Rp. 1.180.904 juta tambahannya dari dana alokasi umum minimum (Rp. 2 miliar) yang seharusnya diterima oleh sebuah kabupaten. Kabupaten Karimun memperoleh jatah sebesar Rp. 2.378.900 juta, sehingga tambahannya dari dana minimum hanya sebesar Rp. 378.900 juta. Untuk kabupaten Natuna, DAUnya adalah sebesar Rp. 2.923, 981 juta, yang berarti hanya lebih dari dana alokasi minimum sebesar Rp. 923,981 juta.







dan pemerintah pusat berkoar-koar akan melaksanakannya pada bulan April 2000, justru APBN 2000 telah melecehkan marwah otonomi terhadap provinsi Riau.

Mencermati adanya kenaikan penerimaan minyak dalam APBN 2000 akibat meningkatnya harga, masyarakat Riau harus menyatukan kembali langkah bersama untuk mempergunakan tambahan rezeki itu agar menetes ke Riau. Tambahan penerimaan RAPBN 2000 itu, akibat diubahnya asumsi harga minyak dari 18 dolar AS menjadi 20 dolar AS adalah sebesar Rp. 2,4 triliun. Dengan mamakai asumsi bahwa minyak Riau menyumbang 60%, maka layak kiranya Riau mendesak pemerintah pusat untuk mengalokasikannya ke Riau sebesar  $15\% \times 60\% \times \text{Rp. 2,4 triliun} = \text{Rp. 216 miliar}$ .

Dana tersebut dapat dipergunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di Riau dengan pendekatan pembangunan padat karya. Pembangunan infrastruktur ini, harus diarahkan ke pedesaan, sehingga diperoleh dua manfaat sekaligus. Yakni terbukanya isolasi desa dan adanya lapangan pekerjaan tambahan bagi pemuda desa yang sebelumnya menganggur. Perbaikan jalan desa akan membawa dampak bagi tergalinya potensi desa untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, setiap pemerintah kabupaten harus secara dini membuat profil masing-masing wilayah kecamatannya sampai tingkat desa. Data ini sangat diperlukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan dengan pendekatan perwilayahan. Profil tersebut tidak hanya berisi ketersediaan SDA, tetapi juga berbagai kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya.\*\*\*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## IMS-GT dan RIAU: Sebuah Perkawinan tak Seimbang

**BERBICARA** tentang arus globalisasi, memang membutuhkan kajian dari berbagai aspek. Dalam kerangka ekonomi era globalisasi, yang diimplementasikan melalui berbagai kerjasama regional maupun internasional (IMS-GT, AFTA, APEC, dll), sebenarnya berawal dari keinginan negara-negara industri baru dan berkembang untuk melepaskan diri dari cengkraman proteksionisme negara-negara maju Eropa dan Amerika.

Banyak sekali permainan politik yang diterapkan negara-negara maju untuk menghambat perkembangan negara-negara industri baru dan negara berkembang itu sendiri. Dihembuskannya isu HAM dan pengetatan melalui berbagai standar-standar kualitas merupakan cara-cara yang sangat sistematis dan strategis oleh negara-negara maju di Eropa untuk menghambat dinamika negara berkembang.

Hal ini dapat terlaksana karena mereka sangat memahami bahwa penanganan masalah-masalah tersebut di





negara sedang berkembang (terutama Indonesia) masih sangat lemah.

Pada tahap selanjutnya dengan keberhasilan membentuk kerjasama ekonomi sebagai konsekuensi era globalisasi, negara sedang berkembang dihadapkan pada dilema yang justru semakin pelik. Mereka harus memacu kerjasama teknologi dan standar kualitas yang menyamai industri- industri negara maju. Keadaan ini menuntut keberadaan *skill* dan tingkat kewirausahaan yang tinggi dan aset uang paling unik, yakni sumberdaya manusia (SDM).

Era globalisasi menjadi "*pedang bermata dua*" yang siap memangkas negara-negara yang sedang berkembang. Pada suatu sisi hasil-hasil produksi mereka tetap saja sulit memasuki pasaran ekspor akibat keterbatasan kualitas sesuai standar internasional, dan di lain sisi mereka harus menghadapi pengusaha mereka, yang sangat tidak efisien dan inovatif, dengan pengusaha-pengusaha dari industri maju dalam pasar domestik.

Satu-satunya jalan adalah dengan mengadakan aliansi kerjasama yang saling menguntungkan. Celakanya, untuk suatu kerjasama senantiasa dihadapkan pada suatu negosiasi dengan mengemukakan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai contoh adalah pada saat Kadin Riau menyampaikan proposal kerjasama dalam rangka IMS-GT beberapa waktu lalu di Pekanbaru.

Berbagai keunggulan yang dapat ditonjolkan Riau adalah tersedianya sumberdaya alam (SDM) yang cukup untuk dikelola. Tentu saja dalam hal manajemen usaha, *skill*, uang, teknologi dan birokrasi mereka masih sangat lemah. Jadi, kalau diibaratkan Riau sebagai seorang gadis, maka



Riau adalah seorang gadis yang mulus dan montok, sehingga sangat mengundang selera. Tetapi sayang, ia seorang yang masih bodoh, kurang mampu memanfaatkan potensi dirinya dan masih dibalut oleh tatakrama yang sangat mengungkung.

Celakanya lagi, ia tidak punya uang untuk membiayai berbagai keperluan untuk mengangkat derajatnya. Dapat dibandingkan jika ingin disandingkan dengan lelaki gagah perkasa, pintar dan banyak uang, maka satu kata saja yang dapat diucapkan oleh gadis cantik dan harum tadi: "Persuntinglah saya asal bisa ikut denganmu dan terserah apa maumu!"

Masalah mendasar apa sebenarnya yang melekat sehingga Riau khususnya dan bahkan Indonesia pada umumnya terperangkap pada posisi demikian? Dalam konteks ekonomi, pada dasarnya semua itu bersumber dari pemerataan ekonomi yang tidak seimbang, baik antar wilayah, antar sektor dan yang paling keji adalah antar pelaku ekonomi. Sumber penyebabnya adalah sentralisasi kekuasaan dan lahirnya berbagai peraturan yang tidak memihak pada rakyat banyak dan bahkan bertentangan dengan nafas UUD 1945.

Inefisiensi yang muncul dari perilaku para pemburu rente yang mendapat fasilitas pemerintah (berkat kontribusinya pada pemilu dan pemilihan kepala-kepala daerah) menyebabkan terkendalanya pengembangan mutu dan kewirausahaan masyarakat secara massal dan alami (sesuai dengan mekanisme ekonomi yang sesungguhnya).

Masalah lain yang perlu pemikiran yang mendalam adalah rekayasa sosial masyarakat. Selama ini jarang sekali





ada di provinsi Riau bagaimana masyarakat dapat diarahkan kehidupan sosial masyarakatnya, agar tetap bertahan pada norma-norma dan landasan Pancasila, meskipun mereka beralih dari era ketertutupan ke arah era globalisasi yang penuh keterbukaan, transformasi yang sangat deras dan dipercepat teknologi yang pesat.

Justru yang mampu memanfaatkan kondisi transisi masyarakat tersebut adalah pemburu rente yang telah menikmati akumulasi modal yang demikian lamanya.

Berbekal kemampuan akses ke berbagai lini birokrasi mereka mengalihkan ke arah transisi masyarakat tadi ke kondisi konsumtif dan terperangkap pada sistem yang penuh ketergantungan. Baik ketergantungan pada aparat birokrasi, yang didukung oleh sistem peradilan yang "aneh," maupun ketergantungan ekonomi (dalam hal pemenuhan kebutuhannya) pada pemburu rente.

Globalisasi merupakan peluang, jika memang kita bisa terpacu dengan orang yang terlibat dalam percaturan. Tantangan yang dihadapi dengan sendirinya juga terbentang luas justru permukaannya lebih luas dari peluang tersebut. Untuk melewati peluang dan rintangan yang diperlukan adalah kemampuan memanfaatkan kekuatan dan kemauan mengatasi kendala yang masih melekat.

Secara umum langkah yang dapat ditempuh oleh Indonesia adalah menindaklanjuti dan menyempurnakan kembali paket deregulasi 23 Mei 1995 ke arah yang lebih konkrit. Sasaran pokoknya adalah memangkas pengaturan tata niaga berbagai komoditas strategis yang melahirkan undang-undang anti monopoli.

Sudah saatnya kita membuka diri untuk kita sendiri





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebelum membuka diri terhadap bangsa lain. Sebagai proses pembelajaran bagi provinsi Riau khususnya dalam menghadapi IMS-GT dan APEC sangat dibutuhkan suatu keberanian pemerintah daerah untuk secara nyata dan tegas mengkaitkan keberadaan usaha kecil dan menengah (UKM) di daerahnya dengan berbagai proyek pembangunan yang berskala besar baik oleh pemerintah maupun swasta.

Untuk itu diperlukan adanya pemantapan strategis global pembangunan dengan mengembangkan *strategic business unit* (lini birokrasinya) ke arah yang lebih efisien dan produktif. Sangat disayangkan kiranya, jika masih banyak kalangan dinas instansi, yang terkait langsung dengan pengembangan kewirausahaan masyarakat, jangankan untuk memahami apa itu IMS-GT mengenalnya saja pun belum.

Upaya lainnya adalah menyusun suatu strategi transformasi masyarakat dari kondisi yang serba terisolasi ke arah kondisi keterbukaan dan globalisasi. Untuk itu diperlukan adanya rekayasa sosial yang valid dan komprehensif dari segala aspek kehidupan masyarakat Riau yang multi ras dan *multi purpose*.

Dalam hal ini, peran aliansi antara Pemda dan Perguruan Tinggi (PT) sangat menentukan. Mungkin Riau dapat mencontoh bagaimana provinsi Daerah Istimewa Aceh mengembangkan kebijakan pembangunan di daerahnya dengan membentuk tim ahli yang solid di samping gubernurnya.

Selanjutnya, implementasi program pengembangan SDM harus digalakkan dan diperluas meskipun membutuhkan investasi yang relatif besar. Khusus untuk membina SDM di kalangan pengusaha kecil sekaligus



mengembangkan skala usahanya, sudah saatnyalah di tiap daerah tingkat II (kabupaten) dikembangkan melalui suatu lembaga yang disebut dengan Bisnis Inkubator sesuai dengan panduan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Usaha Kecil dan Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil.

Suatu studi kelayakan intensif yang menyangkut pendirian Bisnis Inkubator di setiap daerah tingkat II dengan berpedoman pada stratifikasi produk unggul yang dimiliki mutlak diperlukan.\*\*\*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Krisis dan Keterpurukan Investasi Riau

**GERAK** roda perekonomian suatu negara ditopang oleh tiga variabel utama, yakni konsumsi, investasi dan ekspor. Ketiga variabel ini pada dasarnya juga saling mempengaruhi satu sama lain. Kenaikan investasi akan membuka lapangan pekerjaan dan memberi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya, mereka membelanjakan pendapatan itu untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumsi akan naik sejalan dengan naiknya pendapatan masyarakat.

Berbeda halnya dengan konsumsi. Ekonomi hanya ditopang oleh variabel industri akan rentan dan memiliki keterbatasan untuk berputar secara positif. Masyarakat akan memiliki keterbatasan melakukan konsumsi sesuai kemampuan pendapatan mereka. Kenaikan inflasi menyebabkan daya beli mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang didorong konsumsi dengan sendirinya mengalami kemandekan sebatas kemampuan atau





daya beli masyarakat. Krisis ekonomi yang terjadi selama ini menyebabkan investasi menjadi turun dan ekonomi berputar hanya ditopang oleh konsumsi masyarakat.

Di Riau, keterpurukan investasi akibat krisis sesuai data yang dikeluarkan BPS, sangat jelas sekali. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) meskipun mengalami kenaikan, namun itu terjadi hanya adanya peningkatan investasi pada sektor bisnis tertentu. Sedangkan di sektor lain umumnya mengalami penurunan. Pada tahun 1995 (sebelum krisis) total PMDN di Riau Rp. 4.669.466,24 juta dan tahun 1998 (setelah krisis) naik menjadi Rp. 4.991.737,03 juta atau 6,9 persen.

Kenaikan itu terjadi akibat adanya peningkatan investasi di bidang industri kertas yang mencapai 110,75 persen, pertambangan 26,36 persen, dan perhotelan 22,43 persen. Sedangkan sektor-sektor yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat mengalami penurunan seperti industri makanan yang mengalami penurunan mencapai 14,97 persen, perkebunan anjlok menjadi 90,23 persen dan industri lainnya turun sebesar 12,71 persen.

Baik sebelum maupun sesudah krisis kontribusi investasi terbesar di Riau adalah pada sektor bisnis industri kertas. Pada tahun 1995 *sharing* industri kertas terhadap total investasi PMDN Riau adalah 38,44 persen, diikuti perkebunan sebesar 23,57 persen, dan kehutanan 8,74 persen serta industri kayu 6,25 persen. Jika diperhatikan pola investasi tersebut di Riau ternyata lebih terfokus pada industri di sektor kehutanan. Pada dasarnya tidak banyak masyarakat yang mampu menikmati bisnis ini kecuali konglomerat dan BUMN yang memperoleh hak-hak khusus dari



pemerintah. Sedangkan setelah krisis, tahun 1998, kontribusi industri ini makin dominan. Industri kertas mencapai 75,79 persen dan industri kayu sebesar 5,16 persen. Sedangkan perkebunan sebesar 2,15 persen, industri makanan 5,64 persen.

Keadaan sama juga terjadi dengan penanaman modal asing (PMA). Kontribusi terbesar PMA sebelum krisis adalah pada sektor industri kertas yang mencapai 87,41 persen atau 1971,42 dolar AS. Hanya saja setelah krisis ekonomi terjadi investasi sektor ini terkoreksi mencapai 90,73 persen sehingga tahun 1998 investasinya hanya sebesar 182,68 juta dolar AS. Kontribusinya pada total investasi PMA Riau tinggal 13,25 persen. Kontribusi terbesar terdapat pada industri jasa lainnya yang mencapai 64,75 persen.

Kenyataan ini menjadi menarik untuk disimak mengingat pergeseran ke industri jasa biasanya mencerminkan adanya perbaikan struktur ekonomi yang bersifat subsistem ke arah sektor modern. Keadaan di Riau tentunya tidak seperti itu. Setelah krisis ekonomi terjadi, PMA di Riau terkoreksi mencapai 38,86 persen. Pada tahun 1995 total PMA adalah 2,255.41 juta dolar AS. Sedangkan tahun 1998 hanya tinggal 1,379, 02 juta dolar AS. Artinya pergeseran struktur ekonomi Riau dari sudut investasi PMA terjadi karena menyusutnya investasi pada sektor primer lebih besar dari sektor sekunder dan tertier. Sektor perkebunan kontribusi PMA pada tahun 1998 sebesar 5,35 persen dan ini mengalami peningkatan sebesar 35,41 persen.

Gambaran data menunjukkan arahan pengembangan investasi di Riau belum memiliki kait-kelindan yang jelas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.





dengan pengembangan ekonomi rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pembangunan Riau yang dicanangkan gubernur. Bila investasi PMDN hanya terfokus pada industri padat modal dan tidak dekat dengan pengembangan mata pencaharian masyarakat banyak maka kemungkinan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat semakin kecil adanya.

Selain itu agresivitas PMA untuk merambah peluang bisnis sektor ketiga harus diantisipasi melalui penerapan pola keterkaitan yang tegas. Artinya investor asing yang akan mengembangkan usahanya di Riau harus mencari *partner* pengusaha Riau sebagai upaya pemberdayaan dan perluasan kesempatan berusaha. Bila tidak demikian maka yang akan muncul adalah *saving gap*. Ini akan sangat merugikan Riau pada dua sisi, yakni berkembangnya pengusaha tempatan dan di sisi lain adalah terhentinya akumulasi investasi pada kawasan ini.

Selanjutnya dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Gubernur di depan DPRD Riau telah ditunjukkan pula gambaran persetujuan investasi PMA dan PMDN di Riau pada tahun 1999. Penanaman modal dalam negeri yang telah mendapat persetujuan adalah 26 proyek dengan nilai Rp. 9,94 triliun. Keadaan ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 1998 mencapai 97,35 persen. Sedangkan PMA yang mendapat persetujuan pada tahun 1999 ini mencapai 83 proyek dengan nilai 4,41 dolar, atau naik secara fantastis sebesar 269,09 persen.

Meskipun tidak diperoleh gambaran sektor apa saja yang mendapat limpahan persetujuan investasi tersebut, namun dari kenaikan fantastis itu sudah dapat dipertanyakan





produksi yang tidak menjamin dan ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat yang sangat tinggi, sehingga satu sisi terjadi pertumbuhan tetapi di sisi lain justru terjadi penghapusan atau proses kemiskinan.\*\*\*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Catatan Kecil untuk Kadinda Riau (1)

*(Mencermati “Deklarasi Bali”)*

**KESENJANGAN** ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini semakin menjadi topik yang hangat dibahas para ahli. Keadaan tersebut timbul karena akibat semakin lebarnya jurang kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang mulai menunjukkan sampainya pada muara yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional. Ketidakpuasan sebagian besar masyarakat sebagai akibat dari pembangunan yang terlalu menekankan pertumbuhan dapat menjadi pemicu yang menimbulkan kerawanan kehidupan berbangsa yang harmonis, sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.

Realita kehidupan ekonomi masyarakat dihadapkan pada kondisi dunia usaha yang sudah terlampaui monopolistik. Pengusaha kelas “kakap” telah merambah dan menguasai semua sektor usaha, sehingga lapangan usaha yang tersisa bagi sebagian besar pengusaha kecil sangat sempit. Liem Sioe Liong sendiri sebagai salah seorang In-



donesia, sampai tidak lagi mengetahui sudah berapa banyak perusahaan yang dimilikinya, di bawah naungan Salim Group. Berbagai sumber menyatakan jumlahnya mencapai 600 perusahaan, dan setiap bulannya diperkirakan bertambah 10 perusahaan.

Agar kesenjangan sosial, dapat akibat pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu, yang secara stimulan berpadanan pula dengan masih lemahnya kepastian hukum dan semakin dekatnya memasuki era persaingan menuju pasar bebas, sangat dibutuhkan penangan yang serius dan seksama dari berbagai pihak. Penanganannya harus benar-benar konkrit dan terpadu. Bukan sekedar *lips service* atau slogan-slogan politik yang tidak tampak jelas dalam prakteknya.

### Deklarasi Bali

Menanggapi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat dewasa ini para pengusaha kondang Indonesia melahirkan suatu deklarasi yang cukup menarik. Ada kiranya hal-hal yang perlu dicermati dari deklarasi yang lahir setelah para konglomerat tersebut mengikuti sarasehan P4. Secara substansi sebenarnya ketujuh poin isi deklarasi tersebut bukanlah sesuatu yang baru jika ditinjau dari aspek upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Indonesia menjadi pengusaha unggul yang tangguh.

Butir pertama sampai dengan butir ketujuh yang termaktub dalam Deklarasi Bali tersebut tidak lebih dari penguatan makna dari isi GBHN dan Repelita IV. Hanya redaksinya saja yang berbeda. Namun itu mungkin dimaksudkan sebagai pengejawantahan dari makna GBHN





2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan pengutipan Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan Repelita tersebut. Pertanyaannya adalah dalam bentuk apa dan kerangka kerja yang bagaimana sebagai implementasinya? Artinya, tanpa deklarasi seperti itu pun para konglomerat (dan seluruh rakyat Indonesia) sudah diwajibkan melandaskan seluruh kegiatan dan tingkah laku berbangsa dan bernegaranya sesuai dengan GBHN dan Repelita IV tersebut. Tinggal lagi pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing individu dan kelompok masyarakat. "Ril"nya yang pasti sudah diputuskan oleh wakil-wakil rakyat di MPR.

Jadi, jika saja konglomerat tersebut menyepakati kembali apa yang telah digariskan oleh GBHN dan Repelita IV mungkin saja mereka ingin mendapat legitimasi baru dari berbagai pihak, khususnya pemerintah, bahwa sebenarnya mereka sangat *concern* terhadap cita-cita dan perjuangan bangsa dan negara, meskipun pada prakteknya mereka di lapangan mereka berada pada kutub yang sangat diuntungkan oleh proses pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia selama ini. Dengan demikian, manfaatnya terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah belum dapat dirasakan sama sekali.

Bagaimanapun terdapat dua butir dari isi deklarasi tersebut yang langsung menyentuh pada aspek pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kedua butir tersebut adalah butir keenam (menekankan pada pola kemitraan usaha dan mengerem laju pemburu rente) dan butir ketujuh (meningkatkan pada akses usaha kecil dan menengah, baik terhadap modal, kualitas SDM dan informasi). Lazimnya sebuah deklarasi, memang tidak berbentuk program tindakan, karena suatu deklarasi hanya



mengandung arti bahwa secara bersama orang-orang yang terlibat di dalamnya menyepakati sesuatu hal yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama. Oleh karenanya, jika butir keenam dan butir ketujuh memang ditindaklanjuti dengan program yang nyata dan konkrit maka implikasinya jelas akan memberikan manfaat yang benar.

Satangnya dalam deklarasi tersebut juga terdapat satu butir, yakni butir kelima yang tidak saja dapat ditinjau sebagai unjuk kekuatan, tetapi kalau boleh dikatakan sedikit mengurangi eksistensi kelembagaan Kadin. Terlalu kasar memang jika menganggap substansi dari butir kelima deklarasi tersebut sebagai “pelecehan” terhadap Kadin. Dikatakan sebagai kekuatan karena pada dasarnya butir kelima tersebut seakan memaksa pemerintah melakukan dialog rutin dengan para pengusaha. Di sini seolah-olah selama ini tidak terjadi adanya koordinasi dan sinkronisasi antara kepentingan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan kepentingan pengusaha sebagai pelaku ekonomi yang memiliki peranan atau porsi yang makin besar dalam menopang laju pertumbuhan pembangunan.

“Tamparan” terhadap Kadin terlihat dari fungsi forum yang ingin dibentuk dalam butir kelima deklarasi tersebut. Maknanya sangat dalam karena fungsi forum tersebut tidak saja membahas forum yang dihadapi, tetapi juga merumuskan langkah antisipasi dalam menentukan kebijakan ekonomi yang lebih realistis dan bisa dipertanggungjawabkan bagi kepentingan dunia usaha serta seluruh rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, itulah yang seharusnya menjadi misi Kadin, yakni menjadi jembatan dan





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

memberikan kontribusi untuk menentukan kebijakan yang diambil pemerintah dalam bentuk pemikiran yang konstruktif.

Jadi, sangat aneh kiranya jika dalam butir kelima tersebut tidak disinggung sedikitpun peranan Kadin sebagai media yang akan mengakomodir para pengusaha dan membentuk program dialog tersebut. Bila dicermati lebih mendalam lagi, butir kelima, Deklarasi Bali seakan menimbulkan suatu pertanyaan yang cukup menyengat: "Apakah DPR, Presiden melalui kabinet VI dan seluruh jajaran birokrasi pemerintah selama ini memang tidak berhasil atau mampu merumuskan dan mengambil langkah-langkah antisipasi dalam menentukan kebijakan ekonomi yang lebih realistis dan bisa dipertanggungjawabkan bagi kepentingan dunia usaha dan seluruh rakyat Indonesia?"

Untuk menjawab berbagai fenomena yang lahir dari ditelorkannya Deklarasi Bali seperti yang diuraikan di atas sangat tergantung dari antisipasi dan langkah-langkah berbagai pihak dalam menindaklanjutinya, tidak saja oleh para konglomerat yang menandatangani, tetapi juga oleh pemerintah, dan terutama sekali Kadin sebagai wadah yang diharapkan mampu menjembatani berbagai kepentingan para pelaku ekonomi di Indonesia menuju pada struktur ekonomi yang adil dan saling menguntungkan.\*\*\*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## Catatan Kecil untuk Kadinda Riau (2) *Bercermin pada "Kesepakatan Adelaide"*

### Konferensi Adelaide

UPAYA pemberdayaan pengusaha kecil ternyata tidak hanya menjadi kerja besar bangsa Indonesia. Tantangan yang akan dihadapi dengan berlakunya persetujuan APEC memaksa negara-negara Asia-Pasifik untuk semakin memusatkan perhatian guna memberdayakan pengusaha kecilnya. Konferensi para menteri negara-negara Asia-Pasifik yang tergabung dalam APEC dengan melibatkan 700 pengusaha kecil, pada tanggal 12-15 September 1995 di Adelaide, Australia, berhasil menyepakati beberapa hal pokok yang sangat berkait dengan upaya dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menolong pengusaha kecil menuju era globalisasi.

Selama ini pengusaha kecil sering kalah bersaing di pasar bebas, karena persoalan modal dan rendahnya kualitas SDM. Padahal peranannya selama ini cukup besar dalam perdagangan internasional. Indonesia sendiri terdiri dari 70



persen ekspor komoditi non-migas 40 persen diantaranya dihasilkan oleh pengusaha kecil, meskipun nilai tambahnya tidak sepenuhnya dinikmati pengusaha kecil tersebut.

Isu yang dikembangkan pada Konferensi Adelaide ini menyangkut; pembentukan “bapak angkat” dan penyatuan dana untuk menangani masalah pemasaran, pelatihan dan pengembangan produk pengusaha kecil. Disamping itu, direkomendasikan pula pemanfaatan sarana internet yang berbiaya murah (meskipun tidak banyak pengusaha yang dapat menggunakannya, terutama di Indonesia).

Bila hasil Konferensi Adelaide, yang akan diusulkan dalam pertemuan tingkat tinggi APEC di Jepang nantinya dapat diterima dan diimplementasikan menjadi program yang konkret, maka suatu peluang dan tantangan yang besar akan “menganga” lebar dihadapan pengusaha kecil. Bagi Indonesia, program bapak angkat sudah lama diterapkan. Tinggal lagi bagaimana menyempurnakan-nya dalam bentuk mekanisme kerja yang saling menguntungkan “bapaknya” dari pada “anak asuhnya.”

Menyangkut penyatuan dana untuk kepentingan penanganan masalah pemasaran, pemodalán dan pengembangan kualitas SDM juga sudah diarsir di Indonesia. Melalui pemanfaatan dana BUMN, Indonesia telah mencoba menerapkan bagaimana mengakomodasi-kan sumber-sumber dana yang dapat diarahkan pada pemberdayaan usaha kecil tersebut.

Pelaksanaannya dan sistem penanganannya memang masih dapat dikatakan sangat sembraut dan parsial program. Jika hal tersebut disempurnakan lagi, maka hasilnya jelas akan sangat membantu usaha kecil, dan dapat secara



cepat mengantisipasi hasil Konferensi Adelaide. Di provinsi Riau misalnya, akibat pengetahuan para pengusaha tentang cara-cara memperoleh dana tersebut sangat minim, dan birokrasi dalam pemanfaatannyapun sangat berbelit-belit, maka dana BUMN yang mencapai Rp. 5,7 miliar baru dapat tersalurkan lebih kurang 10 persen. Bila pengusaha kecil yang akan dibina itu di desa Terkulai Kabupaten Indragiri Hilir, dan untuk memperoleh bantuan dana BUMN harus meminta rekomendasi dari Jakarta melalui direksi BUMN, maka sebelum dana bantuan disetujui saja, pengusaha tersebut sudah keburu tergilas oleh dinamika bisnis yang memang kurang memihak kepadanya.

### **Momentum untuk Kadinda Riau**

Beberapa hari lalu Kadinda Riau baru saja melaksanakan rapat kerja. Apa hasil yang diperoleh dari rapat kerja tersebut? Jelas banyak pihak yang belum mengetahuinya, baik para pengusaha yang punya kepentingan besar dengan lembaga tersebut maupun pihak-pihak lain yang ingin terlibat secara bersama memikirkan pemberdayaan pengusaha Riau, khususnya pengusaha kecil dan menengah (UKM). Berpegang pada prinsip praduga tak bersalah, jangan-jangan Rakerda itu sendiri juga tidak memahami apa hasil yang telah dicetuskan bila kehadirannya dalam Rakerda hanya sebagai peserta yang 4D (duduk, diam, dengar, dan duit).

Hal yang lebih banyak terseruak di media massa berkenaan dengan Kadinda Riau akhir-akhir ini mengarah pada kepentingan orang per orang. Bahkan sempat muncul pendapat-pendapat tentang lemahnya eksistensi manusia-





manusia yang ada dalam kepengurusan Kadinda Riau sekarang. Sampai secara rutin membayar iuran, tapi tidak memperoleh apa-apa dari lembaga tersebut. Jika dinilai secara sederhana, ocehan para pengusaha tersebut tidak lebih dari omelan *'seorang anak kecil yang minta jajan pada kakeknya.'*

Sempena dengan dilaksanakannya Deklarasi Bali dan Konferensi Adelaide, sambil menunggu hasil-hasilnya di lapangan, maka sudah sewajarnya para pengusaha Riau mulai berfikir untuk mengantisipasinya menjadi tugas Kadinda Riau untuk mengakomodir pemikiran-pemikiran tersebut dan mengimplementasikannya ke dalam program-program kerja yang berkualitas dan kompetitif. Momentum yang ada tersebut harus dijadikan landasan berpijak, dirangkum dengan kondisi struktur ekonomi dan dinamika bisnis yang terjadi saat ini, dalam menyusun strategi di masa mendatang.

Ada dua peluang yang kiranya dapat dijadikan "sasaran tembak" program Kadinda Riau berkenaan dengan lahirnya Deklarasi Bali dan Konferensi Adelaide. *Pertama*, terbukanya akses untuk mendapatkan dana bagi pengusaha guna pengembangan SDM, teknologi dan pemodalan, baik dari dalam (Deklarasi Bali) maupun luar negeri (Konferensi Adelaide) yang mungkin saja diimplementasikan dengan sistem yang lebih sederhana dan mudah.

*Kedua*, peluang untuk mengembangkan kemitraan usaha yang makin luas dan saling menguntungkan. Melalui pembentukan jaringan usaha yang terpadu dapat diharapkan adanya kegiatan usaha yang saling berkait dengan prinsip-prinsip yang adil dan bertanggung jawab.



Tantangan bagi Kadinda Riau, tentunya tidak kecil pula. Pada butir ke 7 (tujuh) Deklarasi Bali dituliskan satu kalimat yang berbunyi: “.....harus dihindari pemanjaan usaha kecil yang justru bisa melemahkan semangat kewirausahaan mereka”. Pernyataan ini kiranya menjadi tugas besar Kadinda Riau agar mampu mengangkat kualitas pelaku-pelaku ekonomi Riau. Tantangan lain adalah menentukan cara-cara dan sistem, serta mekanisme menangkap peluang tersebut dengan mengkonsolidasikan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha yang ada di provinsi ini. Upaya untuk mengerem pemburu-pemburu rente yang datang dari luar dengan kemampuan *lobby* dan *power* yang tinggi, perlu kiranya dicarikan jalan keluarnya. Termasuk pula untuk memperbaiki struktur pasar yang makin memonopolistik dan mempertanyakan “koperasi-koperasi tameng,” yang cenderung menguasai jaringan distribusi produk-produk dan usaha-usaha jasa tertentu.

### Kesimpulan

Perkembangan usaha nasional dewasa ini sudah makin monopolistik sebagai akibat pembangunan ekonomi yang terlalu menekankan pertumbuhan. Pengusaha kelas kakap menguasai hampir semua sektor usaha. Kondisi demikian juga terjadi di provinsi Riau. Bila tidak ditangani serius, baik oleh pemerintah maupun segenap masyarakat Indonesia, maka kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi akan semakin parah dan diperkirakan dapat mengancam stabilitas nasional.

Upaya untuk menanganinya adalah dengan menumbuhkan dan memperkuat pengusaha menengah yang unggul, sehingga perekonomian nasional tidak rentan





terhadap gejala dan dinamika era perdagangan bebas. Caranya adalah melalui komitmen dan tindakan yang konsisten dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian dengan menghapus praktik-praktik monopoli, oligopoli dan kartel, serta pengaturan tata niaga yang tidak memihak pada perbaikan ekonomi rakyat.

Deklarasi Bali dapat saja dinilai sebagai suatu kesadaran baru dari para konglomerat untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Peluang itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama melalui eksistensi Kadin yang kokoh dan antisipasi terhadap dinamika bisnis di masa mendatang.

Sementara Kesepakatan Adelaide jika dapat disetujui dalam pertemuan tingkat tinggi APEC di Jepang merupakan peluang emas untuk mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan secara internasional, termasuk akses terhadap dana yang lebih luas untuk pengembangan modal, teknologi dan perbaikan kualitas SDM.

Aspek-aspek tersebut di atas harus lebih dicermati oleh Kadinda Riau menghadapi Musda mendatang. Rumusan strategi yang tepat dan implementasi programnya harus mengarah pada upaya menangkap peluang-peluang tersebut dan mengkonsolidasikan seluruh kekuatan pengusaha Riau untuk meng-antisipasinya. Jadi, bukan hanya memper-tengklarkan siapa yang duduk dan akan duduk di kepen-gurusan, apalagi menjadi balita yang biasanya cuma “merengek”.\*\*\*





1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

**RENCANA** memberikan reaksi atas pernyataan presiden Gus Dur melalui blokade hasil bumi Riau merupakan embargo ekonomi rakyat Riau terhadap pusat. Ditinjau dari aspek sejarah, alasan kuat untuk dilaksanakannya embargo ekonomi adalah makna kemerdekaan Indonesia bagi rakyat Riau. Sejak proklamasi kemerdekaan, beberapa kerajaan di Riau mengakui kedaulatan pemerintah pusat NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dan, secara bersamaan pula, diakui telah terjadi “penjarahan” maupun eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber-sumber ekonomi wilayah ini melalui tameng “pemerataan pembangunan” dan “untuk kepentingan rakyat banyak”. Kondisi ini merupakan *elegi singkong dan keju*, sebuah wilayah yang kaya akan SDA (*keju*) dikuras habis, sementara masyarakatnya hanya dijatahi *singkong* untuk mengisi kehidupannya.

67



pembudayaan masyarakat di Riau. Kerusuhan yang terjadi di Lagoi, Pulau Bintan adalah refleksi dari kesewenang-wenangan penguasa selama ini dalam mengukur arti kemerdekaan dan nilai eksistensi masyarakat dalam sebuah wadah NKRI.

Demikian pula dengan kasus Torganda, Bagan Batu, dan yang paling dominan adalah berdiri megahnya berbagai perusahaan minyak, kayu, pasir, dll, adalah sebagai lambang kekuasaan dan penghisapan darah kehidupan rakyat Riau oleh pemerintah pusat NKRI.

Dalam aspek kekinian, setelah reformasi bergulir, dalam kaca mata banyak orang, setelah diperoleh pemerintahan yang demokratis, ceritanya masih tidak berbeda. Harapan yang disangkutkan rakyat Riau pada pemerintahan Gus dur, tampaknya hanya jadi bahan lawakan belaka. Setelah janji muluk pembagian 75 persn pembagian hasil SDA, kini hati rakyat Riau diluluh-lantakkan oleh caci maki dan ketidak konsistenan sikap presiden itu sendiri. Pelecehan presiden Gus Dur yang menyatakan "Riau tidak ada apa-apanya", merupakan pola kepemimpinan dan sitem kekuasaan pemerintahan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dimainkan oleh rezim sebelumnya.

### **Riau dan RAPBN 2000**

Mermin konkritnya, dapat dibaca dari RAPBN 2000 yang diajukan pemerintah Gus Dur terhadap DPR. Disamping terlihat konservatif, RAPBN 2000 juga sangat tidak akomodatif terhadap terlaksananya otonomi daerah. Dari 64 persen porsi daerah masih diboncengi oleh program sektoral yang "bau" sentralisasinya amat dominan.



Wajah pengurusan SDA sangat kentara pula dalam RAPBN tersebut. Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh masuknya para investor. Kompensasi bagi para investor ini, selain kemudahan dalam mendirikan usaha dan proses bisnis adalah diberinya mereka kesempatan untuk mengelola SDA secara tidak wajar. Para pemburu rente tidak akan begitu saja menanamkan uangnya, tanpa melihat adanya peluang memperoleh keuntungan dalam waktu singkat.

Periode waktu jangka pendek ini, diambil mengingat situasi politik di Indonesia ke depan belum dapat diprediksi secara baik. Konsekuensinya, bila investasi dalam mengolah SDA ingin kembali dengan cepat, haruslah dengan mengeksploitasinya secara berlebihan. Kenyataan itu, ditunjang pula oleh besarnya beban bunga utang maupun cicilannya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pembayaran bunga utang luar negeri dalam RAPBN 2000 mencapai 32,13 persen, yakni Rp. 58,989 triliun. Sedangkan pembayaran bunga dalam negeri dalam rangka rekapitulasi adalah Rp. 42,364 triliun, sehingga total pembayaran utang secara keseluruhan akan mencapai Rp. 101,353 triliun atau 55,20 persen.

Pinjaman baru sebesar Rp. 23,184 triliun hanya akan menutupi 22,88 persen beban utang. Untuk itu, selanjutnya diperlukan penggalan sumber-sumber dalam negeri khususnya pajak. Dalam menggairahkan ekonomi, sangat diperlukan masuknya investasi dari para pemodal. Lemahnya institusi yang ada karena virus KKN yang masih bersarang kuat, menyebabkan birokrasi masih bersifat homogen dan tidak elastis. Keadaan ini, merupakan





kesempatan bagi pemburu rente untuk melakukan eksploitasi SDA dan SDM secara semena-mena. Riau dengan kekayaan SDA yang masih tersisa dan besarnya kelompok masyarakat dengan kualifikasi mutu yang masih rendah, akan menjadi sasaran empuk bagi pemburu rente untuk mengefisiarjnya atas nama investasi.

Menatap ke masa depan untuk mendapatkan titik cerah, dengan sistem yang ada sekarang, bagi Riau sulit diperoleh. Perkembangan ekonomi secara alamiah, justru akan dihadapi tantangan besar. Anjloknya harga TBS sebesar 21 persen menjadi hanya Rp. 300 merupakan masalah besar bagi perekonomian Riau. Daya beli masyarakat yang menggantungkan ekonominya dari sektor perkebunan sawit, akan terkoreksi tajam.

Yang perlu diperhatikan adalah, jika kondisi itu menimbulkan kefrustasian, sementara pemerintah tidak mampu memberikan jalan pemecahannya, maka yang akan muncul adalah kerusuhan berantai. Ini dilandasi oleh sebuah kenyataan mengingat jumlah masyarakat petani sawit di Riau sangat besar dengan kualifikasi pendidikan yang rendah. Contoh yang sama dapat dilihat dari apa yang dialami oleh petani bawang di Brebes, Jawa Tengah, yang membuang bawang mereka di jalan raya, karena harga jual yang jauh di bawah biaya produksi.

Sementara sisi lainnya, akibat persaingan yang kian tajam, harga *plywood* di pasar internasional mengalami penurunan tajam. Pada mulanya, harga mencapai 400 dolar AS per meter kubik, kini hanya menjadi 300 dolar AS per meter kubik.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, para pengusaha



kiranya blokade hasil bumi Riau dalam bentuk embargo ekonomi rakyat Riau terhadap pemerintah pusat NKRI, merupakan jalan terbaik. Ini dimaksudkan, agar Riau punya kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya. Inilah kiranya yang perlu dipahami masyarakat Riau secara baik, khususnya bagi mereka yang dengan bangganya akan mengikuti kongres. Semoga.\*\*\*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



*phywood* dan perkayuan, tentunya harus melakukan efisiensi biaya produksi. Cara yang paling sering mereka tempuh adalah melakukan PHK atau pemotongan gaji para pegawai. Adalah upaya ini, konflik sangat potensial untuk menguak ke permukaan. Ini disebabkan jumlah buruh yang terkait dengan industri perkayuan di Riau cukup besar. Koreksi terhadap daya beli mereka signifikan bagi terkendalanya dinamika ekonomi di daerah ini. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, khususnya PPh dalam mengantisipasi pembiayaan dalam negeri akan ditanggapi buruk oleh para pengusaha yang sejak masa krisis telah mengalami tekanan bisnis yang cukup keras. Tidak kecil kemungkinan, untuk daerah Riau justru yang akan terjadi adalah arinya modal ke luar negeri (*capital flight*), mengingat situasi investasi memang belum kondusif sambil menghindari beban pajak. Investasi yang diharapkan, memacu ekonomi hanya akan jadi impian belaka.

Harga minyak bumi yang kini melambung dan menjadi andalan pemerintah daerah, diperkirakan hanya akan bertahan selama enam bulan. Meskipun ada kuota dalam pasar minyak internasional, Indonesia tentunya akan tetap memanfaatkan tenggang waktu enam bulan itu dengan meningkatkan produksi. Artinya, eksploitasi yang terhadap minyak akan meningkat dan cadangan untuk masa depan akan menipis. Riau dengan sendirinya akan sangat dirugikan oleh persoalan ini, karena minyak tidak dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sementara, ketika ada wewenang untuk mengelolanya cadangan minyak tidak lagi ekonomis bagi pemberdayaan rakyat Riau.

Mengacu pada berbagai persoalan yang telah diungkap,